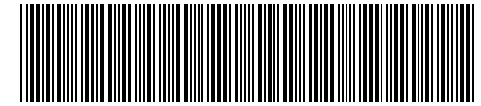




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.667777/2022**



DS:5763-8675-4003-7158

Revisi ke 01

Tanggal : 15 Desember 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 4. Kode/Nama Satker : (667777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 190.000.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 190.000.000
Rp. 190.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 190.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 190.000.000

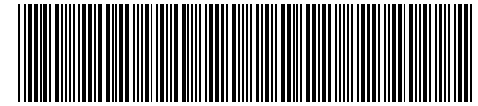
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667777/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5763-8675-4003-7158

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

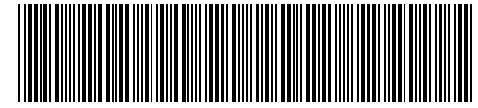
Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			190.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			190.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	20,00	Rekomendasi Kebijakan	162.965.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	20.00	Rekomendasi Kebijakan	162.965.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	7,00	Orang	27.035.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	7.00	Orang	27.035.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667777/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5763-8675-4003-7158

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

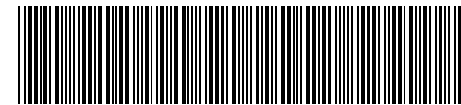
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667777	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	190.000	-	-	-	190.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	190.000	-	-	-	190.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	190.000	-	-	-	190.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	162.965	-	-	-	162.965	33 . 01	
01	RM	-	162.965	-	-	-	162.965	065@	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	27.035	-	-	-	27.035	33 . 01	
01	RM	-	27.035	-	-	-	27.035	065	
JUMLAH		-	190.000	-	-	-	190.000		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667777/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5763-8675-4003-7158

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667777	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	7.992	14.067	13.067	14.067	12.867	14.067	31.198	15.067	15.967	16.767	13.457	21.417	190.000
		BELANJA BARANG	7.992	14.067	13.067	14.067	12.867	14.067	31.198	15.067	15.967	16.767	13.457	21.417	190.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	7.992	14.067	13.067	14.067	12.867	14.067	31.198	15.067	15.967	16.767	13.457	21.417	190.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.992	14.067	13.067	14.067	12.867	14.067	31.198	15.067	15.967	16.767	13.457	21.417	190.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667777/2022
IV A. B L O K I R**



DS:5763-8675-4003-7158

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667777] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

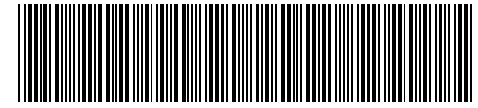
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
667777	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.000		
	52 Belanja Barang Rp. 5.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 500		
	AA		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500		
	AA		
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667777/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:5763-8675-4003-7158

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667777] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003